J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pembaharuan Dan Modernisasi Politik Islam Di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid (1965-2005): Menelaah Konsep Pemikiran Caknur

Qemal Ezra F. Harahap[1], Aris Wahyu Ginting[2], Syahrul Nizar Saragih[3]
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
E-mail: qemal.ezra@gmail.com[1], ariswahyu161@gmail.com[2]

Article History:
Received: 07 November 2024
Revised: 16 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Politik, Pembaharuan, Modernisasi, Islam, Indonesia*

Abstract: *Mengingat kepulangan Nurcholish Madjid dari 2005 silam, Yang selalu menjadi pembahasan pada diskursus pemikiran Cak Nur terkait Pembaharuan dan Modernisasi Politik Islam di Indonesia adalah relevansi pemikirannya pada dunia terkhusus Indonesia yang dewasa ini. Pembaharuan dan modernisasi politik Islam di Indonesia yang diusung oleh Nurcholish Madjid menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan serta politik di era Reformasi. Melalui pemikirannya yang moderat, Nurcholish berhasil menjembatani antara nilai-nilai Islam dan tuntutan demokrasi, menciptakan kerangka pemikiran yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Proses artikulasi politik Islam di Indonesia sangat penting karena diharapkan dapat menghasilkan sintesa yang mungkin antara Islam dan negara. Oleh karena itu, studi tentang pemikiran politik Islam yang khas di Indonesia tidak hanya menarik tetapi juga mendesak. Dan kemudian lebih berfokus pada cara melaksanakannya untuk mengubah Indonesia yang lebih maju.*

PENDAHULUAN

Abad ke-19 dan ke-20 adalah saat di mana umat Islam memasuki pintu masuk ke pembaharuan. Saat-saat ini dikenal sebagai "abad modernisme", di mana masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa Barat jauh mengungguli mereka. Dengan demikian, berbagai kelompok Muslim menanggapi dengan cara yang berbeda berdasarkan kebiasaan Islam mereka. Ada yang menanggapi dengan sikap akomodatif dan mengakui bahwa masyarakat sedang terpuruk dan harus mengikuti bangsa Barat agar dapat bangkit dari keterpurukan itu, sementara yang lain menanggapi dengan menolak apa pun yang datang dari Barat karena mereka pikir itu tidak sesuai dengan Islam. Kalangan ini dikenal sebagai kaum revivalis karena mereka percaya bahwa Islam adalah agama terbaik dan bahwa umat harus kembali ke dasar-dasar wahyu.

Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu tokoh penting dalam pembaharuan Islam, dan dia adalah seorang pembaharu yang unik, unik, dan misterius. Berdasarkan pembagian corak keIslaman yang disebutkan di atas, Afghani memiliki cara yang berbeda untuk menanggapi dominasi Islam di Barat. Di satu sisi, untuk memperbaiki kerusakan masyarakat, Afghani sangat

moderat dengan menerima gagasan Barat. Di sisi lain, ketika bicara tentang masalah Islam atau kebangsaan, Afghani sangat keras. Oleh karena itu, Afghani berdiri di dua sisi, menjadi modernis dan fundamentalis.

Reaksi umat Muslim setelah bersentuhan dengan Modernisme Barat, tersegmentasi menjadi tiga bentuk. 1). Menerima modernisme barat secara utuh yang tercermin dari elit muslim yang belajar di barat dan menerima pendidikan gaya barat. 2). Penolakan dari kelompok non-terpelajar, yang meyakini bahwa kemunduran Islam disebabkan oleh tidak berjalan nya syariah Islam secara utuh. 3). Sintesa yang meyakini bahwasannya agama Islam tidak lah menjadi pembatas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan lainnya.

Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Sayyid Jamal al-Din Assad abadi (1838–1897), yang juga dikenal sebagai al-Afghani, adalah tokoh reformis yang paling berpengaruh dalam sintesa ini. Mereka berusaha mencapai suatu bentuk pembaruan Islam yang lebih dekat dengan definisi kedua di atas: pemulihan atau perbaikan semangat rasional dan ilmu pengetahuan Islam, serta interpretasi prinsip-prinsip dasar Islam sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Muslim masa kini.

Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Jamal al-Din al-Afghani dianggap sebagai pencipta konsepsi baru pembaruan Islam; Abduh dianggap sebagai bapak modernisme Islam, dan Afghani dianggap sebagai penggagas yang optimistik tentang kesatuan Islam sebagai prasyarat untuk kebangkitan intelektual, ekonomi, dan politik Islam. Pandangan Afghani bahwa dominasi imperialisme Barat atas dunia Islam yang menindas merupakan ancaman besar bagi Islam adalah dasar dari perkembangan ide-idenya. Dia percaya bahwa pembaharuan mutlak diperlukan karena itu adalah cara bagi Muslim untuk menentang dominasi Eropa. Selain itu, ia memasukkan rasionalisme yang lebih luas ke dalam penafsiran sumber Islam, seperti Al-Quran, menekankan pentingnya perjuangan, dan mendorong Muslim untuk berjuang melawan fatalisme dan semangat kepasrahan yang menghalangi jiwa, pikiran, dan masyarakat. Pemikir Islam berikutnya, termasuk tokoh tokoh modern, telah terpengaruh oleh gagasan-gagasannya.

Pembaruan Islam di Indonesia berawal dari para ulama yang pulang ke tanah air setelah menempuh pendidikan agama di kota suci Mekkah. Mereka berupaya mengkritik berbagai bentuk kepercayaan dan praktik ibadah yang dianggap menyimpang dari ajaran yang benar. Selain itu, mereka menolak taklid dan mendorong dilakukannya ijtihad, yaitu penafsiran bebas terhadap sumber-sumber kitab dan hukum Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah.

Gerakan Modernisasi Islam Indonesia, merupakan kelanjutan dari sebuah gerakan yang menjadi awal, dinamakan “gerakan pemurnian” *(revivalisme)*. Gerakan ini dapat dilihat dari pembaruan yang dilakukan oleh K.H Ahmad Dahlan (1868-1923). Ia menggagas Muhammadiyah sebagai sebagai cikal bakal pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada tanggal 12 November 1912. Lahirnya Muhammadiyah, tidak terlepas dari percikan pemikiran Muhammad Abduh (1849-1905) tentang keharusan dan pembaruan atau modernisasi system pendidikan Islam. Dan organisasi Muhammadiyah ini juga terinspirari melalui pemikiran nya Muhammad Ibn Taimiyah (1728 M/1328 H), Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1787 M), dan Jamaluddin Al – Afghani (1839-1879 M). (Abdillah, 1999)

Dengan memperhatikan kemajuan perkembangan modernisasi Islam saat itu, maka pada tahun 1967, para kaum muda muslim, cukup gencar membahas untuk adanya gerakan modernisasi Islam. Bukti buktinya dapat dilihat melalui koran mahasiswa seperti : *Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi, Gema Mahasiswa (terbian Dema UGM), Harian Kami, Harian Masa Kini* (Madjid, 1992). Bahkan di lingkungan HMI sendiri, pembahasan terkait kemodernan ini kerap dibahas dalam setiap agenda latihan kader, dan juga konferensi konferensi di cabang

seluruh Indonesia.

Pada tahun tersebut juga, muncul sederetan nama yang mewarnai periode baru intelektual muslim Indonesia. Diantaranya agent ide dari Yogyakarta dan Jawa Tengah seperti Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Mansyur Hamid, Dawam Rahardjo, dan juga Nurcholis Madjid yang sebagai sentral kajian dalam tulisan ini.

Periode baru intelektual muslim Indonesia, setidaknya ditandai dengan tokoh tokoh cendikiawan yang mencoba memahami secara sistematis perkembangan dunia intelektual muslim Indonesia. Yang pasti, terkait corak pemikiran dan visi yang dikembangkan serta inter – relasi mereka dengan komunitas komunitas intelektual yang masih terus mengikuti perkembangan.

Tulisan Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, merupakan sumber yang cukup baik dalam memetakan periode baru pemikir islam pada era 1980-an. Setidaknya ada empat corak pemikiran yang dikembangkan para intelektual muslim Indonesia pada era tersebut, diantaranya : *pertama,* Neo – Modernisme, adalah penggabungan antara dua paham yang menjadi factor penting yaitu tradisionalisme dan modernisme. Dalam aliran nya, ada dua tokoh intelektual yang menjadi penggagas lahirnya pemikiran tersebut ialah Nurcholish Madjid (Caknur) dan Abdurrahman Wahid (Gusdur). *Kedua,* Sosialisme – Demokrat, ialah gerakan islam yang mencita citakan keadilan sosial dan berdemokrasi sebagai unsur pokok Islam. Muhammad Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dan Kuntowijoyo merupakan tokoh dalam aliran ini. *Ketiga,* Universalisme, yang menganggap bahwasannya ajaran agama Islam merupakan ajaran yang Universal atau yang artinya menyeluruh. Amien Rais, Jalaluddin Rakhmat, dan A.M Saefuddin merupakan pendukung dari aliran ini. *Keempat,* Modernisme, yaitu gerakan politik yang melibatkan Islam kedalam pesoalan yang lebih luas. Ahmad Syafii Maarif dan Djohan Effendi merupakan kelompok dari aliran ini. (Fachry Ali, 1986)

Poin-poin di atas memotivasi Nurcholish, salah satu pembaharu Islam, untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, karena dalam pandangan Cak Nur, mayoritas umat Islam telah terperangkap dalam praktik-praktik keagamaan yang keliru, yang menyebabkan menurunnya jumlah umat Islam secara umum.

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa modernisasi atau pembaharuan dalam Islam bukan hanya keharusan tetapi juga kewajiban. Menurut Nurcholis Madjid, modernisasi adalah pelaksanaan ajaran dan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, modernisasi ini sama dengan rasionalisasi. (Madjid, 1992)

Nurcholish Madjid yang merupakan seorang tokoh modernism bahkan disebut sebagai Neo – Modernism di Indonesia, yang perlu di apresiasi atas gerakan serta pemikiran pemikirannya dalam membaharui umat Islam. Gerakan yang dilakukan oleh Caknur, merupakan proses untuk memahami masalah masalah keislaman secara rasional dan komprehensif, serta dapat menyelaraskan dengan antara ajaran agama dan perkembangan sains dan teknologi.

Bukti historis dapat dilihat ketika Caknur sebagai tokoh yang tekun untuk memperjuangkan pemikiran modernisasi Islam di Indonesia adalah setelah beliau menyaksikan kenyataan bahwasannya Islam di dan masyarakat Islam yang ada di Eropa Barat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari berbagai aspek keilmuan, dan masyarakatnya. Adapun yang melatarbelakangi caknur untuk meng upayakan modernisasi islam di Indonesia ialah untuk merasionalisasikan umat Islam dalam pemahaman agama mereka, dan menambah kualitas keagamaan umat. Karena caknur melihat bahwa umat islam Indonesia memiliki corak pemikiran yang terbelakang, irrasional, dan rendah pemahaman agama.

Nurcholish Madjid, memulai gerakan modernisasinya dengan gencar dalam bentuk wacana, dimulai ketika ia menjadi Ketua Umum PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa

Islam) periode 1966-1969 pada saat itu dia menulis artikel dengan judul *Modernisasi ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi*. Seperti yang diungkapkan Andre Beufre, mengatakan bahwa gerakan modernisasi sangat penting karena garis-garis pemikiran tradisional tidak akan dapat memberikan kemajuan pada Islam dan bahwa umat Islam saat ini harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan, karena setiap manusia secara fitrah memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempotensikan diri sebagai khalifah dan penentu masa depan Islam. Dengan demikian pola pembaruan pemikiran yang dikembangkan Caknur merupakan hal yang relevan untuk dikaji dan dikembangkan dalam rangka kemajuan umat Islam menghadapi modernisasi. (Nihaya, 2002)

Intelektual Islam seperti Nurcholish Madjid tidak dapat dilepaskan dari gerakan Islam reformis Indonesia pada tingkat individu. Ia mulai menyuarakan ide-ide reformisnya secara proaktif dan luas sejak tahun 1970 dan terus melakukannya sampai akhir hayatnya pada tahun 2005. Ia kemudian menjaga jarak dengan Masyumi, Muhammadiyah, Persis, dan al-Irsyad untuk menyuarakan pentingnya pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Dia pikir organisasi-organisasi Islam ini kehilangan dinamika dan menjadi konservatif. Selain itu, ia mengeluarkan slogan populer, "Islam yes, Partai Islam no," yang dianggap oleh para pemimpin senior Masyumi sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka dan bukti kolaborasinya dengan upaya rezim Orde Baru untuk mendepolitisasi Islam. Nurcholish terus menyebarkan ide-ide reformisnya, terutama melalui Paramadina, lembaga pendidikan Islam yang didirikannya pada tahun 1986.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pembaharuan dan Modernisasi Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menurut Kuntowijoyo (2005), setidaknya ada lima tahapan dalam metode peneltian historis. Diantaranya pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi,dan historiografi (penulisan sejarah).

Heuristik

Mencari dan menemukan sumber yang diperlukan adalah bagian dari heuristik. Berhasil atau tidaknya pencarian sumber bergantung pada pengetahuan peneliti tentang sumber yang diperlukan dan kemampuan mereka untuk melakukan penelusuran sumber secara teknis. Sumber-sumber sejarah dapat berupa dokumen, arsip, buku, majalah, jurnal, dan surat kabar, tergantung pada cara mereka disajikan.

Adapun sumber yang akan digunakan penulis terbagi 2 yakni sumber primer dan sumber sekunder ;

1. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang mendukung penelitian. Data primer dalam penelitian ini juga berasal dari observasi lapangan, yang terkait langsung dengan penelitian ini. Selain itu, temuan wawancara dengan para peneliti dengan tema terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, foto-foto, e-book, dan dokumen tentang pemikiran pembaharuan dan modernisme islam di Indonesia perspektif Nurcholish Madjid.

Dalam proses penelitian ini, pengumpulan sumber dilakukan dengan metode *Library Research* (Studi Kepustakaan), dan Studi Dokumentasi.

Kritik Sumber

Sumber-sumber yang digunakan untuk penulisan sejarah ilmiah harus dievaluasi secara menyeluruh dan kritis. Apakah sumber itu benar-benar diperlukan, menurut penilaian eksternal? Apakah sumbernya asli, turunan, atau tidak asli. Dengan kata lain, kritik sumber menilai keakuratan sumber dan kedibilitas data sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan fakta. Untuk memudahkan klasifikasi data berdasarkan kerangka tulisan, setiap data harus dicatat dalam lembaran lepas, atau sistem kartu (Kartodirjo, 1982).

Interpretasi

Langkah berikutnya adalah interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan dari sumber-sumber sebelumnya. Setelah itu, peneliti harus mampu menjelaskan hubungan antara informasi sejarah yang telah ditemukan dari sumber-sumber sebelumnya. Untuk mencapai tujuan ini, selain memiliki sumber dan data yang memadai, adalah penting untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif. Ini penting karena upaya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah melalui fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Seorang sejarawan harus memiliki dua kemampuan: berperan sebagai pelaku sejarah dan menjelaskan bagaimana peristiwa terjadi. Seorang sejarawan juga harus mampu berpikir diakronik (kronologis dan sinkronik).

Historiografi

Langkah selanjutnya adalah historiografi, atau penulisan sejarah yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Ini adalah tahap akhir dari proses penelitian sejarah, di mana peneliti harus menulis laporan hasil penelitian yang dengan jelas menggambarkan peristiwa yang mereka pelajari dan semua proses yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa tersebut. Ada kemungkinan bahwa historiografi dapat didefinisikan sebagai tulisan yang memeriksa dan menganalisis berbagai peristiwa yang terkait satu sama lain dan memberikan nilai dan makna. Tahapan ini, menurut Gottschalk (1983:48), adalah proses merekonstruksi imajinasi peristiwa masa lalu dengan menggunakan data baru. Tulisan yang kemudian dibuat bukan hanya tulisan fakta-fakta dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan; itu adalah tulisan yang lengkap yang mencakup proses penelitian dari awal hingga akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Politik Islam di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid (1965-2005)

1. Latar Belakang Keluarga

Nurcholish Majid atau yang lebih dikenal dengan sapaan Cak Nur, ia dilahirkan di Mojoanyar Jombang pada tanggal 17 Maret 1939, tanggal 26 Muharram 1358 Hijriyah. Orang tua Nurcholish Madjid menamainya Abdul Malik, tetapi ketika dia berumur enam tahun, orang tuanya mengubah namanya menjadi Nurcholish Madjid karena Abdul Malik kecil yang sering jatuh sakit. Anak yang sering sakit dianggap "kabotan jeneng", atau keberatan nama, dan karena itu harus diganti. (AF, 2010)

Ayanya, H. Abdul Madjid, adalah seorang kiai yang lulus dari pesantren Tebuireng, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Hubungan ayah Nurcholish dengan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini sedemikian dekat, baik sebagai murid maupun sebagai menantu dari Halimah,

keponakan KH. Hasyim Asy'ari, sebelum akhirnya bercerai karena tidak memiliki keturunan. Dan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari pula yang membantu ayahnya untuk menemukan pasangan selanjutnya yang akan menjadi ibu kandung Nurcholish. Dia adalah Hj. Fathonah, putri dari KH. Abdullah Sadjad, yang juga dekat dengan KH. Hasyim Asy'ari. Ibunya juga berasal dari Nahdlatul Ulama, adik dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah aktivis SDI di Kediri, Jawa Timur.

Nurcholish Madjid adalah anak pertama dari empat bersaudara. Nucholish Madjid dikenal sebagai "Cak Nur". Rutinitas sehari-harinya adalah belajar di sekolah umum pagi dan mengaji di Madrasah al-Whathaniyyah, yang dipimpin oleh ayah kandungnya sendiri. Saat kecil, Nurcholish Madjid lebih suka membaca buku daripada bermain karena ayahnya kebetulan memiliki koleksi buku yang sangat lengkap. (Ahmad A Royhan, 2003)

Ayah Nurcholis Madjid aktif di kedua organisasi Islam tradisional, Nahdlatul Ulama (NU), dan partai politik modernisasi Islam, Masyumi. Ayahnya tetap memilih masyumi pada tahun 1952, tetapi ayah Nurcholis Madjid, yang juga aktivis masyumi, kecewa dengan NU ketika mereka keluar dari masyumi dan membentuk partai politiknya sendiri. Nurcholis Madjid sering dijuluki "anak masyumi kesasar" oleh teman-temannya di NU karena ulah sang ayah. Dia pernah mengatakan, "Ayah sendiri dimusuhi oleh para kiai jombang, karena situasi seperti ini, lalu saya minta ayah pindah ke NU." (William, 1997)

Namun, ayah Nurcholis Madjid menolak usulnya dengan alasan bahwa masyumi lah yang dapat berpolitik, bukan NU. Ayah Nurcholis Madjid tetap teguh pada pilihan politik dimasyumi dan tetap menjaga keanggotaan NU. Akibatnya, Nurcholis Madjid tidak dapat bertahan lama di darul ulum. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di sana, Nurcholis Madjid kecil tidak lagi dapat bertahan di pesantren tersebut. Ia meminta ayahnya untuk memindahkannya ke lembaga pendidikan yang berbeda.

2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat di Mojoanyar di pagi hari, dan di Madrasah al-Wathaniyah di sore hari. Nurcholish menyelesaikan sekolah dasar dan ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Darul Ulum di Rejoso, Peterongan, Jombang. Dia belajar di bawah asuhan K.H. Romli Tamim, seorang ulama yang memimpin pesantren dan mursyid Tarekat Qodiriyah Wan Naqsyabandiyah. Nurcholish hanya bertahan sekitar dua tahun di pesantren ini. Ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat bukan karena masalah akademik, karena ia dianggap sebagai siswa yang cerdas secara akademik. Sebaliknya, itu karena dua hal: ideologi politik dan kesehatan. dan alasan yang terakhir tampaknya lebih berpengaruh. (Ridwan, Pluralisme Borjuis : Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur, 2002)

Atas dasar hal tersebut, Ayahnya kemudian memindahkan Nurcholish ke pesantren lain. Akhirnya, Abdul Madjid memindahkan Nurcholish ke Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, juga disebut *Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah* (KMI) Darussalam, Gontor, Ponorogo. Intelektualitas Nurcholish Madjid sangat dipengaruhi oleh perpindahan pendidikannya ke Gontor. yakni tradisi yang menggabungkan dua budaya: gaya liberal Barat modern dan tradisi Islam klasik. Kedua kultur ini ditunjukkan pada Pengajaran dan materi pelajaran . Gontor juga menawarkan pelajaran kitab kuning dari ulama klasik, tetapi dengan metode pembelajaran modern, yang kurang dikenal dalam tradisi pesantren klasik. (Urbaningrum, 2004)

Di bawah asuhan Tri Murti di KMI Gontor (K.H. Zainuddin Fanani, K.H. Ahmad Sahal, dan K.H. Imam Zarkasyi), Nurcholish mulai terlihat sebagai seorang pemikir yang cemerlang. Para ustadz dan pengasuh pesantren modern ini, terutama K.H. Imam Zarkasyi, memberikan banyak

dorongan kepadanya. Sebagai contoh, ia menyelesaikan studinya hanya dalam waktu lima tahun, dari enam tahun yang seharusnya. Setelah berhasil menunjukkan bahwa ia dapat mempelajari semua pelajaran di kelas dua, ia diizinkan untuk pindah ke kelas tiga setelah menyelesaikan kelas satu. (AF, 2010)

Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1960, Nurcholish berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Muhammadiyah di Solo. Namun, karena harus memiliki ijazah SMA untuk bisa melanjutkan ke sana, keinginan tersebut tidak pernah terwujud. Nurcholish akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan sastra Arab di Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dulu bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) setelah berkonsultasi dengan Kiai Zarkasyi. Kemampuan bahasa Arabnya, yang diperolehnya ketika masih menjadi santri di Gontor, membuat jurusan yang dipilihnya sangat sesuai dengan latar belakangnya.

Dengan memilih jurusan di universitas sekuler, karir pendidikan Nurcholish semakin jelas menunjukkan bahwa ia tidak sedang menuju ke posisi alim secara tradisional. Dia meninggalkan studi fiqih atau teologi untuk memprioritaskan apa yang secara substansial merupakan sifat dasar manusia. Judul skripsinya, *"Al-Qur'an Arabiyun Lughatan Wa Alamiyyun Ma'nan"* ("Al-Qur'an secara bahasa Arab, secara makna adalah universal."), menunjukkan hal ini juga. Nurcholish, yang lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi dosen di institusinya mulai tahun 1972 hingga 1976. (Barton, 1999)

Nurcholish mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation pada tahun 1978 untuk melanjutkan pendidikan ke Program Pasca Sarjana di Universitas Chicago, AS. Di sana dia bertemu dengan ilmuwan neo-modernis Pakistan Fazlur Rahman, yang juga menjadi dosen pembimbingnya. Fazlur Rahman mengajak Nurcholish Madjid untuk melakukan penelitian tentang studi keislaman. Nurcholish Madjid lulus dengan nilai cumlaude pada tahun 1984 dengan desertasi berjudul *"Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah: A Problem of Reason and Revelation in Islam."* (Ibnu Taimiyah dalam Ilmu Kalam dan Filsafat: Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam).

3. Aktivitas Organisasi – Politik

Nurcholish banyak terlibat dalam berbagai organisasi sebagai mahasiswa. Ia adalah Ketua Umum Cabang Ciputat HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di tahun 1960-an, yang selanjutnya menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI dari 1966 hingga 1969 dan 1969 hingga 1971. Ia juga menjadi presiden pertama Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) dari 1967 hingga 1969, dan wakil Sekretaris Jenderal International Islamic Federation of Student Organization (IIFSO) dari 1969 hingga 1971.

Himpunan Mahasiswa Islam dianggap sebagai gerakan kaum modernis yang cenderung dekat dengan Masyumi, Karena itu pula Nurcholish memutuskan untuk menjadi aktif di HMI, yang Dimana pilihan tersebut tidak biasa untuk mahasiswa saat itu. Keinginan ayahnya untuk memiliki rasa hormat yang tinggi pada pemimpin-pemimpin Masyumi, seperti Mohammad Natsir, adalah faktor utama yang memengaruhi keputusannya. (Barton, 1999)

Nurcholish, sebagai ketua umum PB HMI, tepatnya pada tahun 1968, pergi ke Amerika dalam rangka menghadiri undangan program pemerintah AS dengan tema "Profesional Muda dan Tokoh MasyarakatPendapat Nurcholish Madjid yang cenderung tidak percaya pada Barat akibat konsep modernisasi dan westernisasi yang diusung banyak intelektual "sekuler" pada awal orde baru menjadi salah satu alasan ia diundang untuk berkunjung ke Amerika pada tahun 1966-1968. Durasi kunjungan tersebut adalah lima minggu. Nurcholish Madjid bertolak ke wilayah Timur Tengah setelah kunjungan tersebut dan tidak langsung kembali ke tanah air. (Urbaningrum, 2004)

Muhammad Kamal Hassan menganggap kunjungannya ke Amerika Serikat sebagai langkah awal yang menjanjikan menuju era sekularisme, dan disini lah dia mengalami perubahan paradigma fikir. Namun, Nurcholish begitu meyakinkan sebelum berkunjung ke Amerika Serikat untuk bersikap kritis terhadap akibat-akibat buruk dan kegagalan dunia barat secara keseluruhan. Dia melakukan ini untuk menentang sikap moderat dari teman-teman modernisnya seperti , Djohan Effendi, M. Dawam Raharjo, dan Ahmad Wahib. (Barton, 1999)

Nurcholish berbicara tentang sekulerisasi di sebuah acara Halal bi Halal dan silaturahmi organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa Islam yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami), dan Gerakan Mahasiswa Islam (GPI). Pada acara yang diadakan pada 3 Januari 1970 di gedung pertemuan Pusat Penelitian Islam di Jakarta, Caknur membacakan makalah berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat." Makalah ini merupakan kesempatan bagi Caknur untuk mengungkapkan pendapatnya tentang sekulerisasi dan mendorong kaum muslimin untuk membedakan antara hal-hal transendental dan substansial. Dalam makalah ini terdapat banyak pernyataan yang mengejutkan, seperti frase "Islam Ya, Partai Islam Tidak", sekularisasi kebebasan intelektual *(intellectual freedom)* atau kebebasan berpikir, gagasan kemajuan *(idea of progress),* dan sikap terbuka. (Madjid, Nurcholish, 1992)

Ada banyak reaksi terhadap pidato ini, termasuk polemik dan tuduhan bahwa Nurcholish telah berubah secara drastis. Namun, alih-alih menawarkan tuntunan, pendekatan Nurcholish Madjid justru lebih bersifat kritis terhadap umat Islam. Perubahan pandangan dan sikapnya, tentunya sangat mengecewakan para ahli modernis seperti M. Natsir dan Hamka. Kedua tokoh ini bersikukuh bahwa Nurcholish Madjid memiliki semangat Islam dan kecakapan intelektual, namun perjalanannya ke Barat telah mengecewakan mereka karena dianggap tidak normal dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pada tahun 1972, Nurcholish kembali berpidato di Taman Ismail Marzuki Jakarta untuk cendekiawan muda muslim, membahas gagasan pembaruan yang dilontarkannya dan menulis makalah berjudul "Menyegarkan Paham Keagamaan Di Kalangan Umat Indonesia". Pada kesempatan itu, dia dengan tegas menentang konsep "Negara Islam" dan menentang konsep sekularisasi jika umat Islam ingin maju. Tokoh muslim seperti mantan Menteri Agama Prof. Dr. HM Rasyidi, Abdul Qodir Djailani, Endang Syaifudin Anshori, dan Hassan Metarium sekali lagi mengecam ide ini. Prof. Dr. H.M. Rasyidi adalah orang yang mengkritik paling kuat bahwa istilah "sekularisasi" dan "sekularisme" mengandung prinsip yang memisahkan masalah agama dan dunia, dan bahwa hal itu nantinya akan merugikan Islam, maka hal tersebut harus dihindari.. (Pardoyo, 1993)

Selama tahun 1971–1974, pemikiran pembaharuan Nurcholish Madjid terus dikritik. Menghadapi tanggapan ini, Caknur semakin aktif dengan ide-idenya. Dia membangun Yayasan Samanhudi dan menjabat sebagai direkturnya dari tahun 1974 hingga 1976. Nurcolish banyak berbicara dengan M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Abdurrahman Wahid, dan Syu'bah Asa di Yayasan tersebut. Pada saat yang sama, dia dan rekan-rekannya menerbitkan Mimbar Jakarta, sebuah majalah Islam yang sangat menantang dalam menyebarkan ide-ide pembaharuan. Orang-orang yang tidak setuju dengannya mengkritik tulisannya di majalah ini. (Barton, 1999)

4. Politik Islam Era Orde Lama – Orde Baru

Seperti yang kita ketahui bahwa dua masalah utama—krisis politik dan ekonomi menyebabkan rezim Orde Lama runtuh. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi tinggi sebesar 650 persen, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan kekuatan ekonomi regional dan global

adalah beberapa faktor yang mendorong dan mempercepat revolusi, yang kemudian berakhir dengan tragedi 30 September 1965.

Pemerintah Orde Baru belajar banyak dari situasi ini. Melihat sejarah perpolitikan dan ekonomi Orde Lama, tidak mengherankan bahwa, pada tahun-tahun pertama setelah tahun 1965, pemerintah melakukan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik. Semua struktur sosial yang ada, terutama ekonomi, dimodernisasi oleh Orde Baru melalui tindakan strategis. Di bawah Orde Baru, perubahan di bidang ekonomi lebih ditekankan daripada di bidang politik. Pada awal pemerintahan Orde Baru, istilah "politik no" dan "ekonomi yes" dalam politik dan ekonomi sering digunakan. (Fauzi, 2022)

Stabilitas adalah prinsip utama bagi pemerintah untuk memperlancar semua program itu. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah melakukan reorganisasi politik untuk menciutkan peran politik masyarakat dengan keberhasilan stabilitas. Reproduksi sistem politik yang ditandai oleh kekuatan militer yang semakin meningkat, seperti ABRI dan birokrasi, dan Golkar serta fusi partai dari semua partai yang ada. Jumlah partai politik menjadi dua: PPP dan PDI. Selain itu, struktur jabatan fungsional diubah dengan menempatkan orang yang setia dan mendukung pemerintah melalui Golkar. Walaupun tidak adil, tidak mengherankan bahwa orientasi politiknya berasal dari Golkar mendapatkan jabatan dari tingkat menteri hingga pejabat kepala rukun tangga (RT). Pemimpin politik yang tidak berafiliasi dan tidak setia kepada pemerintah disingkirkan dan digantikan oleh pemimpin yang lunak dan mudah diatur. Namun, tampaknya yang paling menyedihkan bagi umat Islam, terutama Politik Islam, adalah ketika pemerintah Orde Baru dengan cara yang otoriter melakukan desimbolisasi, deideologisasi, dan depolitisasi terutama terhadap umat Islam dan partai Islam. (Nadroh, 1999)

Berdasarkan dari beberapa kebijakan yang disebutkan di atas, Orde Baru menawarkan atau bahkan melaksanakan warna kehidupan baru kepada masyarakat dan menciptakan struktur sosial ekonomi dan politik baru. Sebagai bagian dari modernisasi, peta perpolitikan Indonesia mengalami pergeseran paradigm: dari sebelumnya berfokus pada ideologi menjadi berfokus pada kemajuan. (Nadroh, 1999)

Namun, suatu hal yang paling penting adalah bahwa banyak kebijakan dibuat atas dasar modernisasi dan pragmatisme pembangunan. Ini memaksa orang Islam, terutama intelektual Islam politik yang lunak dan akomodatif, untuk melakukan perubahan strategis dan reinterpretasi untuk tetap hidup dalam gejolak perubahan yang berlangsung dan tak terhindarkan. Namun, ada beberapa intelektual Islam Politik yang berpendapat bahwa apa yang ditawarkan atau bahkan dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru adalah kezaliman dan melanggar hak azazi mereka untuk berpartisipasi dan menerapkan ajaran agama mereka. Individu-individu ini biasanya meninggalkan arena sambil berlawanan. Akibatnya, mereka tidak jarang ditangkap, dipenjarakan, atau bahkan meregang nyawa di tangan penguasa Orde Baru. (Fauzi, 2022)

Pentulan Partai Masyumi adalah contoh yang menarik dalam hal ini. Setelah partai mereka dibubarkan oleh Soekarno dengan "tangan besinya" pada tahun 1960, mereka berharap partai mereka akan direhabilitasi dan berpartisipasi lebih aktif dalam politik nasional selama era Orde Baru. Harapan mereka didasarkan pada kenyataan bahwa mereka adalah bagian penting dari umat Islam yang berkontribusi besar dalam menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang telah mengancam keutuhan negara. Namun, harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Di bawah Orde Baru, mereka bahkan ditahan dan dipenjarakan atas tuduhan melakukan makar. Namun, alasan yang paling jelas mengapa pemerintah Orde Baru tidak ingin merehabilitasi Partai Masyumi adalah karena struktur politik Orde Baru tidak menginginkan "kekuatan penyeimbang", dan fobia yang kuat terhadap kekuatan politik Islam ditengah tengah pemerintahan dan militer.

Siti Nadroh mengungkapkan dalam bahasa yang sangat lugas, katanya,

> *"Dalam kaitan ini hemat penulis, alasan mendasar pemerintah tidak mau merehabilitasi Masyumi lebih disebabkan karena faktor politis ketimbang ideologis. Artinya pemerintah merasa kekuatan dan curiga se-bagaimana yang dikatakan Franz Rudianto munculnya ekstrem Islam yang akan mewarnai wacana perpolitikan Orde Baru dan mampu mengimbangi atau membahayakan kekuatan negara dibandingkan dengan sikap keras aktivis Masyumi untuk tetap memperjuangkan Negara Islam".* (Nadroh, 1999)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketika intelektual Masyumi menjadi sangat kecewa karena pemerintah tidak mau merehabilitasi partai mereka dan melarang mereka menempati posisi penting dalam kepengurusan Partai Parmusi, muncul seorang intelektual muda bernama Nurcholish Madjid. Dia sangat dihormati karena keberaniannya dan kepemimpinannya, dan diharapkan akan menggantikan M. Natsir sebagai generasi penerus untuk memimpin Partai Parmusi. Mengingat bahwa Nurcholish memiliki kemiripan intelektual dengan M. Natsir, harapan itu sebenarnya tidak berlebihan. Kedua memiliki kekayaan intelektual Islam klasik dan filsafat Barat.

5. Pembaharuan Politik Islam Menurut Cak Nur

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, latar belakang pemikiran seorang tokoh dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Dalam kasus Nurcholish Madjid, situasi politik, khususnya perselisihan ideologi dan dasar negara antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, yang terjadi selama Orde Lama dan menjadi lebih buruk selama Orde Baru, berperan sebagai sutradara yang membentuk kerangka teori berpikir nya. masalah korelasi antara Islam dan Negara adalah yang utama.

Karena keduanya menguasai beberapa bahasa asing, Nurcholish dan M. Natsir keduanya adalah pemikir kosmopolitan yang mampu menyerap filsafat Barat kontemporer. M. Natsir menguasai bahasa Inggris, Perancis, Arab, dan Belanda, sementara Nurcholish menguasai bahasa Inggris, Perancis, Arab, dan Parsi. Nurcholish sangat dekat dan baik dengan M. Natsir, bahkan ketika mereka bertemu secara pribadi. Sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, ayah kandung Nurcholish, KH. Abdul Madjid, memiliki hubungan organisatoris dan emosional yang kuat dengan M. Natsir, meskipun dia lahir dan dibesarkan dalam tradisi Universitas Nahdlatul Ulama. (Fauzi, 2022)

Namun, sekali lagi, kenyataan tidak selalu mengikuti keinginan. Nurcholish yang santai ternyata memiliki tujuan yang sangat berbeda dari yang diharapkan banyak orang, terutama mereka yang menghormati M. Natsir dan Hamka. Namun, ia (Nurcholish) kemudian menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan saat ini sesuai dengan pendapat dan keyakinan M. Natsir.

Nurcholish Madjid berpikir tentang sekularisasi pada awal 1970-an sebagai cara untuk mengatasi tantangan modernisasi, yang menjadi fokus utama pemerintah Orde Baru. Ide ini muncul karena dia khawatir dengan kondisi politik Indonesia, terutama politik umat Islam. Kemudian kegelisahan itu dituangkan dalam gagasan pembaharuan dalam pidatonya pada malam silaturrahmi organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa, dan sarjana Muslim yang tergabung dalam HMI, GPI PII, dan Parmusi pada 3 Januari 1973 di Gedung Pertemuan Pusat Penelitian Islam Menteng Raya, Jakarta. Nurcholish mengungkapkan dalam ceramahnya yang berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" bahwa kaum muslim Indonesia mengalami stagnasi dalam pemikiran keagamaan mereka dan telah kehilangan "kekuatan daya gerak psikologis" dalam perjuangan mereka. (Madjid, Keharusan Pembaharuan

Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat , 1998)

Dia melihat ketidakmampuan mayoritas kaum Muslim untuk membedakan nilai-nilai temporal dan transendental sebagai tanda penting dari kemandegan ini. Nilai-nilai yang harus transenden dianggap sebagai nilai-nilai temporal, dan sebaliknya; ini bahkan sering terjadi. Segala sesuatu tampak dianggap sakral karena sifat transendentalnya. Akibat dari keberagamaan ini, Islam dianggap setara dengan tradisi. Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa umat Islam harus melakukan sekularisasi terhadap pemikiran Islam. (Madjid, Masalah ingtegrasi Umat).

Menurutnya, sekularisasi yang dia maksud diambil dari karya Talcot Parson, Harvey Cox, dan Robert N. Bellah, dan didefinisikan sebagai "pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan agama dari kehidupan duniawi dan akhirat", bukanlah penerapan sekularisme dalam defenisi filosofis, dalam arti satu paham yang mengandung pemisahan agama dari negara atau pemisahan kehidupan dunia dan akhirat. (Nadroh, 1999)

Oleh karena itu, sekularisasi, menurut Nurcholish, berarti membebaskan tatanan sosiokultural dari ikatan formal keagamaan. Agama berfungsi sebagai nilai moral pada tingkat yang lebih abstrak. Namun, ini tidak berarti bahwa agama tidak lagi penting dalam kehidupan duniawi. Agama berfungsi sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan orientasi, makna hidup, dan legitimasi terhadap tertib sosial.

Nurcholish berpendapat bahwa sekularisasi politik harus dilakukan karena, di satu sisi, keadaan politik Orde Baru menuntut perubahan dalam tindakan dan perilaku emosi umat Islam. Di sisi lain, idealisme integrasi adalah sesuatu yang tidak realistis dan utopis, dan hanya akan mengakibatkan kejumudan dan kemacetan pemikiran umat. Namun, orang-orang yang menganut agama Islam telah kehilangan kemampuan untuk membedakan nilai-nilai yang dianggap Islami dari nilai-nilai melembaga yang dianggap Islami. Mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang bersifat transendel dan mana yang hanya bersifat temporal. (Nadroh, 1999)

Semangat demokratisasi tertanam dalam ide sekuralisasi atau desakralisasi Nurcholish Madjid, dan dalam konteks ini, itu juga berarti menolak ide partai Islam atau negara Islam. Nurcholish berpendapat bahwa sekuralisasi atau desakralisasi akan memiliki efek yang akan menghancurkan monopoli dan konsentrasi kekuasaan melalui pengendalian pemimpin partai atas sistem simbolik keagamaan. Selain itu, melalui proses tersebut, ia berharap akan terjadi pemencaran kekuasaan yang akan memberikan dasar pembenaran bagi setiap orang (Muslim) untuk merasakan dirinya sebagai Muslim, meskipun mereka tidak pernah terlibat dengan ideologi atau partai yang secara formatik menggambarkan Islam. Nurcholish mengatakan bahwa gagasan "Negara Islam" sangat populer di kalangan orang Islam di masa lalu dan merupakan bentuk kecenderungan apologetik. Dia berpendapat bahwa dua faktor mendorong perkembangan apologi tersebut.

(Nurcholish Madjid & Agus Edi Santoso, 2008). *Pertama*, terdapat upaya untuk memberikan apologi terhadap ideologi-ideologi Barat (modern) seperti demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Ideologi-ideologi ini bersifat totaliter, mengendalikan setiap aspek kehidupan, terutama dalam hal budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Apologi terhadap ideologi modern ini berujung pada apresiasi ideologis terhadap Islam, yang mendorong munculnya konsep "Negara Islam" yang sebanding dengan konsep negara demokratis, sosialis, atau komunis. Selain itu, penghargaan terhadap ideologi politik yang totaliter memunculkan pemikiran apologetis yang menyatakan bahwa Islam bukan sekadar agama, seperti halnya Buddha, Hindu, Kristen, dan agama lain, yang lebih berfokus pada aspek spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam pandangan ini, Islam dipahami sebagai *ad-Din*, yang dimaksudkan untuk mencakup segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kedua, terdapat legalisme yang mengarahkan sebagian umat Muslim pada pemikiran apologetis mengenai "Negara Islam". Legalism ini menciptakan apresiasi yang sangat legalistis terhadap Islam, di mana penghayatan keIslaman dipahami sebagai struktur dan kumpulan hukum. Tipe legalisme ini berakar dari Fikihisme, yang merupakan sistem hukum yang dirumuskan oleh para ulama Islam pada abad kedua dan ketiga hijrah. Kodifikasi hukum ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengaturan sistem hukum di negara dan pemerintahan yang pada saat itu mencakup wilayah dan populasi yang sangat luas. Fikihisme ini memiliki pengaruh yang dominan di kalangan umat Islam, sehingga banyak upaya reformasi masih berfokus pada aspek ini. Sistem hukum ini sering kali disebut sebagai syariat. Dengan demikian, "Negara Islam" menjadi harapan bagi umat Muslim agar Islam dapat menampilkan berbagai aturan dan hukum yang relevan.

Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid sangat berfokus pada penjelasan bahwa Islam yang sejati tidak hanya berupa struktur atau kumpulan hukum yang berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Sebaliknya, Islam dipahami sebagai pelaksanaan tauhid yang dapat menghasilkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis, dan menghargai pluralisme dalam masyarakat. (Santoso, 2008)

B. Modernisasi Politik Islam di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid (1965-2005)

1. Definisi Modernisasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid

Modernisasi adalah Keniscayaan

Modernisasi bukanlah westernisasi, tapi adalah rasionalisasi (Madjid, 1992). Madjid memandang Islam hari ini memerlukan upaya modernisasi yang dianggapnya adalah proses rasionalisasi dan bukanlah westernisasi. Namun pada kenyataan nya ide ide baru tidak selalu mendapatkan wadah dalam masyarakat. Gerakan gerakan pembaharuan dalam Islam yang menyangkut baik itu kejumudan dalam berpikir ataupun kejumudan dalam berpolitik (formal) telah muncul sejak lama bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Arus pergerakan modernisasi semakin lama menggerus dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia.

Kemajuan sains dan teknologi telah memasuki dunia Islam, terkhusus setelah pembukaan abad ke-19 yang dianggap oleh Ummat Islam sebagai awal abad modern. Gesekan secara lansgung dengan dunia barat memberikan ide ide baru yang dibawakan didalam dunia Islam seperti rasionalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sebagainya. Hal tersebut menimbulkan persoalan persoalan baru, dan para pemimpin Islam pun mulai memikirkan bagaimana solusi dari persoalan persoalan tersebut. (Nasution, 1992)

Maka dalam hal itu, Madjid dalam upaya menyumbangkan pikirannya terkait masalah modernisasi, berpandangan bahwa modernisasi memiliki definisi identik dengan definisi dari rasionalisasi. Dan ini berarti sebuah proses perubahan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak akliah. Fungsinya adalah memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Maka sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasannya Islam adalah *the way of life*, dengan sendirinya akan menganut pola berpikir islami yang berdasar kepada nilai nilai besar dalam Al-Qur'an. Demikian juga dengan penilaian tentang modernis, juga berorientasi kepada nilai nilai besar Islam. Sederhananya, modernisasi adalah suatu keharusan bahkan mutlak. Karena modernisasi adalah perintah Tuhan yang Maha Esa. (Madjid, 1992)

Kiranya apayang dikemukakan oleh Madjid tidak jauh berbeda dengan apayang dikemukakan oleh salah satu tokoh neo-modernism yaitu Fazlur Rahman. Menurutnya, perkembangan intelektual tersebut adalah permulaan dalam modernisasi, lebih lanjut bahwa Islam pernah menghasilkan peradababan yang progresif. Dan kenyataannya pernah menyongsong era modern

dari rahim purbakala. Berdasarkan ajaran tersebut, sangat mengakar bahwa Islam itu rasional. (Rahman, 1987)

Lebih jauh lagi, Madjid memberikan penekanan yang kuat pada modernisasi, dengan berargumen bahwa Islam hanya menerima akal dan bahwa, karena fitrah manusia, akal dapat digunakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran fundamental. Oleh karena itu, kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran yang relatif bahkan dalam konteks Islam. Karena wahyu Tuhan, yang memunculkan agama melalui para nabi, memungkinkan makhluk yang lebih tinggi untuk mengetahui kebenaran absolut. Inilah sebabnya mengapa Islam menentang rasionalisme, yaitu konsep yang mengakui kemutlakan rasio, seperti yang dianut oleh kaum komunis. Sebaliknya, seorang rasionalis percaya bahwa akal dapat menemukan kebenaran, bahkan kebenaran akhir, dan menggunakan akalnya semaksimal mungkin.

Fokus utama dari gagasan Nurcholis Madjid tentang modernisasi sebagai "Rasionlisasi" adalah kritik terhadap umat Islam itu sendiri. Dalam tulisannya tentang modernisasi, Nurcholis Madjid menganjurkan perubahan dalam pemahaman Islam sehingga tidak menjadi dokrin yang tidak berkembang. Dia menggunakan istilah seperti liberalisasi, desekularisasi, desekralisasi, intelektual Fredoom, ijtihad, konsep kemajuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Pada dasarnya, ia bermaksud untuk menentang tradisionalisme dan sektarianisme.

Secara menyeluruh, tulisan Nurcholis Madjid tentang modernisasi bertujuan untuk memberikan pelajaran teologis kepada orang-orang agar mereka dapat menanggapi modernisasi dengan cara yang positif. Dia menegaskan bahwa ideology modernisasi itu berasal dari ajaran Islam, bukan seperti modernisasi Barat yang dibangun di atas dasar materialisme dan sekularisme.

Rasionalitas dan Ilmu Pengetahuan

Pada awalnya, pergulatan antara sains dan agama mencakup semua ranah, baik yang berkaitan dengan alam maupun masyarakat. Madjid menyatakan bahwa perdebatan ini bukan hal yang tidak terduga karena agama mengharuskan seseorang untuk menerima sebuah keputusan dengan teguh dan tanpa pertanyaan. Ilmu pengetahuan, di sisi lain, menuntut sikap skeptis terhadap suatu temuan ilmiah. (Madjid, 1992)

Nurcholish menyatakan bahwa ketidaksepahaman dalam cara pandang dalam mendefinisikan situasi atau realitas inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara agama dan ilmu sosial. Paling tidak, ilmu sosial dan agama berbeda dalam dua hal. *Pertama*, ilmu sosial bertujuan untuk menjelaskan realitas. Selain itu, banyak ilmu sosial yang berkonsentrasi pada pengembangan paradigma, namun metode ilmiah yang digunakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan empiris yang masih terbuka. Dua kategori konflik antara agama dan sains ini melibatkan ilmu sosial. Ilmu sosial menegaskan bahwa ilmu sosial pada dasarnya mirip dengan agama. *Kedua*, Ilmu sosial memandang dirinya sebagai metode yang terpisah untuk membangun kesadaran duniawi.

Russell berpendapat bahwa untuk mendamaikan keduanya, sebuah kompromi diantara keduanya harus dilakukan. Hal ini diperlukan karena agama dapat dipelajari dengan menggunakan ilmu sosial. Nurcholish berpendapat bahwa para sarjana agama sendiri harus belajar tentang agama di samping harus mampu melakukan penelitian ilmiah sosial untuk menemukan jalan tengah dalam konflik antara ilmu sosial dan agama. Karena riset ilmiah hanya akan menghasilkan fakta-fakta yang dapat diukur, sedangkan riset agama hanya akan menghasilkan teologi. Dengan demikian, menurut Nurcholish, lembaga-lembaga ilmiah dapat membantu pengembangan orang-orang yang berpengetahuan luas tentang ilmu sosial dan agama. (Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, 1992)

Menurut kepercayaan Islam, iman adalah elemen utama yang mempengaruhi kesadaran beragama. Akan selalu ada diskusi tentang keimanan dalam kegiatan keagamaan. Biasanya, topik pembahasannya adalah menjaga keimanan, kehati-hatian, atau membentengi diri. Mengapa Islam menempatkan nilai yang begitu tinggi pada iman?

Hal ini disebabkan karena sangat dekat kaitannya antara iman dan amal seseorang. Amal bersifat praktis, dan Iman bersifat spritual. Amal seorang muslim adalah bentuk representasi keimanan seorang muslim dan seorang muslim tidak akan disebut beriman apabila tidak terlihat dalam amalannya. Selain dua hal tersebut, agama juga mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu iman, ilmu, dan amal harus dimiliki seorang muslim untuk membangkitkan kesadaran beragamanya.

Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Madjid menjelaskan bahwa banyak sekali hadis nabi yang menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, sebagaimana juga yang tercantum di dalam Al-Qur'an pada surah Al- Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang orang beriman dan berilmu. (Madjid, Islam : Doktrin dan Peradaban, 2019)

2. Elemen – Elemen Modernisasi Politik Islam

Sekularisasi Nurcholish Madjid

Kesepakatan bagi kaum muslim adalah melaksanakan pembaharuan Islam. Jika kita mengamati secara objektif kondisi umat Islam hari ini terkhusus di Indonesia, sebagai kesimpulannya maka garis garis pemikiran tradisional harus dibuang jauh jauh. Sebab sekarang ini lebih penting untuk memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar. Seperti contoh kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok yang lebih besar menandakan lebih pentingnya dinamika daripada kwantitas. Tentunya kombinasi antara keduanya akan memunculkan orientasi gerakan pembaharuan yang lebih besar dan lebih baik.

Caknur dalam melihat persoalan tersebut, dan dalam ide pembaharuannya menilai bahwa kombinasi dari kedua hal tersebut adalah tidak mungkin. Maka dari itu pilihan harus dijatuhkan kepada salah satu diantaranya, dan yang hal itu adalah dinamika. Dari pandangan tersebut, maka dapat ditarik pengertian bahwasannya pembaharuan dapat dimulai dari dua hal yang memiliki keterkaitan. Yaitu melepaskan diri dari nilai nilai tradisional, dan mendekatkan diri kepada nilai nilai yang berorientasi ke masa depan. Nostalgia, atau kerinduan terhadap masa lalu yang berlebihan harus digantikan dengan pandangan visioner ke masa depan. Untuk itu Chaknur merasa diperlukannya upaya liberalisasi. Upaya ini dihadapkan kepada ajaran ajaran dan pandangan pandangan Islam yang ada saat ini. Upaya ini selanjutnya dikenal dengan nama sekularisasi, yang dikenalkan dan oleh Nurcholish Madjid.

Sekularisasi yang dimaksud Chaknur, berangkat dari proses pembebasan umat muslim yang terjebak dari Sejarahnya sendiri sehingga tidak lagi sanggup membedakan nilai nilai Islami mana yang transedental dan mana yang temporal. Bahkan hierarki dari nilai nilai tersebut sering terbalik, seperti transcendental yang semuanya bersifat ukhrawi tanpa terkecuali. Sikap itu tercermin dari tindakan sehari hari mereka. Akibatnya Islam menjadi senilai dengan tradisi, Islamis sederajat dengan tradisionalis. Karena hal itu, timbul kesan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi yang bersifat reaksioner. Kesan inilah yang memunculkan ketidaksanggupan umat Islam untuk memberikan respons yang sewajarnya terhadap upaya pembaharuan dan perkembangan pemikiran di dunia yang dewasa ini. (Madjid, 1992)

Penekanan inilah yang dilakukan Chaknur dalam memberikan gambaran terhadap sekularisme dan sekularisasi dengan harapan umat Islam terkhusus di Indonesia agar lebih

terbuka terhadap persoalan persoalan keagamaan. Setelah melihat kaum muslimin Indonesia yang terjebak didalam kejumudan dan kehilangan *phsylogical striking force* dalam perjuangannya.

Pluralisme dan Toleransi

Sadas Dalam konteks pembaharuan pemikiran Islam, Cak Nur berfungsi sebagai motornya. Tidak hanya membahas masalah keislaman bidang pemikirannya; juga membahas problem antropologi, kemasyarakatan, dan politik budaya dengan cara yang abstrak. Dikarenakan keluasan gagasan ini, cendikiawan Islam di Indonesia akan merasa bahwa pemikirannya terus berkembang, bahkan ada yang berusaha mengembangkannya. (Madjid, Islam : Doktrin dan Peradaban, 2019)

Dalam diskusi mengenai pluralisme agama, Budhy M Rachman merupakan salah satu dari sekian tokoh yang mengembangkan perspektif Nurcholish tentang isu ini. Ia berpendapat bahwa pluralisme agama seharusnya dibangun di atas fondasi yang universal, bukan semata-mata dari sudut pandang Islam seperti yang diusulkan oleh Cak Nur. Menurutnya, pluralisme harus didasarkan pada nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua pihak. Saat ini, Budhy Munawar Rachman menekankan perlunya keberanian untuk membuka diri terhadap agama-agama lain dan memperkaya diri melalui pemahaman terhadap agama tersebut.

Sementara itu, Dawam Raharjo mengkritik pemikiran pluralisme agama Nurcholish mencerminkan pandangan yang sejalan dengan gagasan Budhy Munawar Rachman. Dawam Raharjo menganggap Nurcholish Madjid sebagai seorang pluralis, namun tidak inklusif. Ia berpendapat bahwa seorang pluralis sejati tidak hanya menerima perbedaan dalam kebenaran agama, tetapi juga harus secara adil mempelajari kebenaran dari agama lain. Menurutnya, Cak Nur adalah seorang teolog Muslim yang berpegang teguh pada Alquran dan as-Sunnah, dengan penekanan utama pada Alquran. Sebagai seorang teolog yang inklusif, menurut Dawam Raharjo, Cak Nur belum sepenuhnya mewakili pluralisme.

Batasan pluralisme agama diberikan oleh Cak Nur sebagai sikap yang menghargai perbedaan dan menganggap pluralitas sebagai sarana untuk kemajuan bersama. Pemikiran Cak Nur memiliki dampak terhadap pemikir lain yang mengikutinya, sehingga akademisi mengkaji dan mengkritisi pemikiran tersebut secara menyeluruh.

Reformasi Pendidikan Islam

Aasdas Tantangan terhadap partisipasi aktif dunia pendidikan meningkat saat mempersiapkan masyarakat yang maju. Lembaga pendidikan Islam memiliki tugas untuk mengkristalisasikan iman sebagai pandangan hidup universal. Mereka juga harus terlibat dalam diskusi dinamis zaman sekarang. Sebagai lembaga alternatif, pendidikan Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang memiliki sifat yang terbuka, egaliter, global, demokratis, dan berwawasan luas, baik dalam hal agama maupun "ilmu modern". Oleh karena itu, peninjauan kembali institusi pendidikan Islam baru-baru ini mendapat perhatian yang serius.

Nurcholish Madjid menunjukkan cara untuk memodernisasi pendidikan Islam dengan melihat realitas pendidikan saat ini. Proses ini dilakukan untuk menemukan metode pendidikan yang ideal untuk digunakan sebagai sistem pendidikan alternatif untuk bangsa Indonesia di masa depan. Kelebihan dan keuntungan dari sistem pendidikan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi konsep pendidikan yang dimaksudkan. Selain itu, berbagai sistem pendidikan yang sudah tua dan tidak relevan akan ditinggalkan.

Dengan demikian, wawasan keilmuan Nurcholish Madjid diperluas. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa dia pernah belajar di dua lingkungan pendidikan yang berbeda. Yang pertama

adalah pendidikan tradisional, di mana dia menemukan kitab-kitab Islam klasik yang menyimpan banyak wawasan tentang kekayaan Islam. Yang kedua adalah pendidikan modern, yang dia pelajari pertama kali di pesantren Gontor Ponorogo. Di sana, Nurcholish Madjid menemukan banyak wawasan tentang kekayaan Islam. Bisa berbicara dalam bahasa Arab dan Inggris, yang memungkinkannya mengakses kepustakaan yang cukup luas untuk membaca buku-buku umum.

Berdasarkan pengalaman pendidikan di atas, Nurcholish Madjid tampaknya benar-benar memahami baik kelebihan maupun kekurangan dualisme pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dia menawarkan solusi untuk memodernisasi pendidikan dengan menggabungkan kedua sistem pendidikan dengan mengambil manfaat dari keduanya, yang menghasilkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif yang tidak hanya menekankan penguasaan terbatas terhadap khazanah keilmuan Islam klasik tetapi juga mempunyai integritas keilmuan modern.

Pondok Gontor Modern secara sederhana mewakili lembaga pendidikan seperti ini karena para santri diharapkan dapat menguasai bahasa Arab klasik dan bahasa Inggris, yang sangat penting untuk belajar di era modern. Selain itu, kurikulum Gontor menggabungkan tradisi belajar klasik dengan gaya modern Barat, yang ditunjukkan baik dalam mata pelajaran maupun sistem pengajarannya. Sistem pendidikan Pondok Modern Gontor berfungsi sebagai contoh dari gagasan Nurcholish Madjid untuk memodernisasi pendidikan. (Barton, 1999)

Gagasan pembaharuan pendidikan Islam berangkat dari system Pendidikan tradisional dan modern. System Pendidikan tradisional mengandung muatan edukasi yang konservatif. Menurut madjid hal ini menjadikan kebebasan berfikir memiliki keterbatasan, yang berakibat berkurangnya kemampuan seseorang untuk merespons dan mengimbangi kehidupan secara global. Konservatisme dunia Pendidikan tradisional menurut Masdar F Mas'udi terletak di cara memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Raharjo, 1987)

Madjid memulai gerakan reformasi pendidikan Islam pada 2 Januari 1970 dengan makalah berjudul "Keharusan Pembaharuan Islam dan Masalah Integrasi Umat," dan terus berlanjut hingga 21 Oktober 1992 dengan makalah "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang." Secara fundamental, makalah-makalah ini membahas isu-isu seperti sekularisasi dan mistikasi.

Dalam pemikiran Islam yang telah berkembang, orientasi pemikiran kesufian mendapat tantangan. Selain itu, setelah kaum Muslim Indonesia mulai melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan lebih mudah berkat kapal-kapal modern yang menggunakan mesin uap, terjadi peningkatan hubungan dengan individu-individu yang memiliki pemahaman Islam yang lebih murni dan berorientasi pada syariah. Hal ini mendorong pemikiran yang lebih menekankan syariat atau fiqih serta penggunaan bahasa Arab, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem dan kurikulum pendidikan pesantren. (Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, 2003)

Nurcholish berargumen bahwa sistem pendidikan Islam yang ideal seharusnya mampu mengembangkan pola pikir liberal atau intelektualisme. Sistem ini diharapkan dapat mengarahkan individu pada dua kecenderungan yang saling berkaitan: melepaskan diri dari nilai nilai konservatif dan mencari nilai nilai yang berorientasi pada masa depan yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendidikan tersebut memiliki dua tujuan dalam dakwah, yaitu menyebarkan moral keagamaan dan mendorong pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, sistem ini mengemban peran yang mengintegrasikan aspek modern dan tradisional. Peran tradisional adalah (1) penyebaran dan transformasi ilmu-ilmu Islam; (2) pemeliharaan tradisi Islam; dan (3) reproduksi ulma. Peran moderen adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan dan lingkungan dengan pendekatan keagamaan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat, pembentukan sumber

daya manusia profesional, dan pemberdayaan sosial ekonomi. memiliki visi yang dapat menjawab masalah kontemporer dan memiliki perspektif yang universal berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa sekularisasi, kebebasan intelektual, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru adalah inti dari pembaharuan pendidikan Islam. Ijtihad dalam konteks pembaruan metodologis diartikan sebagai bentuk kebebasan intelektual. Madjid memahami sekularisasi sebagai suatu proses yang menekankan pemahaman rasional untuk mengedepankan nilai-nilai duniawi. Selain itu, kebebasan intelektual berfungsi sebagai ukuran untuk melakukan ijtihad dalam pembaruan melalui pendekatan metodologis.

Pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan. Di antara dampaknya terhadap pendidikan adalah sebagai berikut: a. Pendidikan dipandang sebagai jalan menuju kesempurnaan, di mana orang mencapai derajat pengetahuan dan keimanan yang diperlukan agar masyarakat dapat berfungsi. b. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam uswatun hasanah, yang disebutkan dalam teks Al Qur'an, pendidikan harus menyertakan kerangka etika dan moral. Artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S Al Ahzab: 21). Mengingat bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. c. Pengembangan potensi (fitrah) manusia.

Setelah melakukan telaah mendalam terhadap kritik Nurcholish Madjid terhadap dunia pendidikan Islam tradisional dan mempelajari berbagai pemikiran serta gagasannya, terlihat bahwa Madjid sangat berobsesi untuk menciptakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan unsur-unsur keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Sistem pendidikan terpadu ini dirancang sebagai alternatif untuk menuju pembentukan masyarakat madani.

Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, reformasi pendidikan Islam menurut Caknur dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, gagasan awal Nurcholish Madjid mengenai modernisasi pendidikan didasarkan pada sistem Gontor sebagai model. Namun, lebih dari itu, Nurcholish Madjid menginginkan model pendidikan yang mengintegrasikan elemen keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Hal ini sejalan dengan platform pembaharuan yang diusungnya, yaitu keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Kedua, gagasan Madjid tentang modernisasi pendidikan secara fundamental merujuk pada peningkatan metode berpikir filosofis dan revitalisasi etos keilmuan Islam, yang keduanya telah memberikan hasil yang sangat baik pada masa klasik Islam. Sebagai dasar historis, modernisasi pendidikan dimulai dengan mengkaji kembali kejayaan umat Islam di masa lampau.

3. Peran dan Pengaruh Pemikiran Nurcholish

Deklarasi “Islam Yes, Partai Islam No”

Partai-partai Islam muncul sebagai akibat dari “ketidakramahan” Orba terhadap Islam. Hubungan antara Islam dan negara selama 32 tahun periode Orba dapat dibagi menjadi dua fase: fase permusuhan, yang berlangsung hingga tahun 1985, dan fase akomodatif, yang berakhir pada tahun 1998. Hubungan antara keduanya sering diwarnai dengan konflik yang jelas-jelas merugikan Islam. Tindakan Orba terhadap umat Islam sangat represif dari tahun 1966 hingga 1981. Terbukti bahwa beberapa kebijakannya tidak searah dengan tujuan umat Islam.

Termasuk diantaranya adalah rehabilitasi Masyumi yang ditolak, penolakan usulan Bung Hatta untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), pembuatan UU perkawinan, upaya untuk memasukkan aliran kepercayaan dalam agama, penggantian pelajaran Pancasila

dengan pelajaran agama dalam kurikulum nasional, pelarangan jilbab bagi siswa perempuan Muslim yang bersekolah di sekolah umum, dan negara mlegalisasi perjudian di tempat-tempat seperti TSSB, KSOB, dan Porkas. Umat Islam selalu berada di pihak yang kalah dan berubah menjadi oposisi terhadap tindakan-tindakan ini. (Iqbal & Nasution, 2010)

Orba juga bereksperimen dengan kebijakan yang mewajibkan semua partai politik dan organisasi masyarakat di Indonesia untuk menganut asas Pancasila (Asas Tunggal). Mengenai kebijakan ini, komunitas Islam memiliki dua sudut pandang yang berlawanan. Karena dianggap sekuler, kebijakan ini ditolak oleh individu dan kelompok yang kritis seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Deliar Noer, namun disambut baik oleh partai politik PPP dan organisasi Islam lainnya termasuk HMI, Muhammadiyah, dan NU. Mereka yang menolak menjadi sasaran perilaku penindasan oleh Orba. Orba merepresi orang-orang berpengaruh yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan membubarkan kelompok-kelompok Islam yang menentangnya. Kasus ini memuncak pada peristiwa Tanjung Priok September 1984, di mana pemerintah membantai ratusan umat Islam. (Iqbal, 2010)

Rezim Orba bersikap akomodatif terhadap Islam pada fase kedua. Akomodasi Orba terhadap kepentingan Islam terbagi dalam empat kategori, menurut Bahttiar Effendy: struktural, legislatif, infrastruktur, dan kultural. Karena akomodasi institusional, sejumlah besar intelektual Muslim saat itu memegang jabatan di berbagai instansi pemerintahan. Ini tidak terlepas dari fakta bahwa Nurcholish terus menerus mempromosikan strategi yang komprehensif sejak tahun 1970-an, alih-alih terkungkung oleh pemikiran yang terbatas. Melalui konsep "Islam Yes, Partai Islam No," ia berusaha untuk memisahkan Islam dari negara. Pada awalnya, ada beberapa Muslim yang menentang usulan ini. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa ada cara lain untuk mendukung tujuan-tujuan Muslim di luar partai Islam.

Teori-teori Nurcholish Madjid memberikan penekanan yang kuat untuk memahami Islam dan keterkaitannya dengan problema modernisasi sosiopolitik kontemporer umat Islam di Indonesia. Konsep "pemikiran baru" ini lebih bersifat pragmatis dan bertujuan untuk menghindari munculnya sikap apologetik. Menurut Nurcholish, untuk melalui jalan modernisasi tidak mungkin sambil mempertahankan kesatuan umat atau merevisi pemikiran Islam.

Lebih jauh lagi, Nurcholish Madjid merekomendasikan agar ideologi partai-partai tersebut segera diubah daripada "tenggelam" oleh adat istiadat yang sudah ketinggalan zaman. Kecenderungan para pemimpin Muslim pada saat itu untuk "mensakralkan" organisasi-organisasi yang tidak bermoral seperti partai-partai Islam, doktrin-doktrin Islam, dan konsep Negara Islam merupakan sesuatu yang dikecamnya. Menurut Nurcholish Madjid, Negara Islam, partai Islam, atau ideologi Islam tidaklah sakral, karena menurut Nurcholish Madjid, Tuhan adalah satu-satunya yang absolut dan Al Qur'an tidak memerintahkan untuk mendirikan organisasi-organisasi semacam itu. Oleh karena itu, ia menciptakan slogan "Islam Yes, Partai Islam No" dalam hal ini dengan tujuan memotivasi umat Islam untuk memilih nilai-nilai Islam di atas organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam.

Bukan karena keyakinannya, penolakan Nurcholish Madjid terhadap sistem partai Islam harus dilihat sebagai ketidakpuasannya terhadap cara orang-orang yang berpartisipasi dalam kehidupan partai-partai politik Islam dalam menerapkan Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam yang sebenarnya dikorbankan oleh tindakan-tindakan politik dan penerapan Islam seperti itu. Gejala umum dari gerakan "pemikiran baru" adalah ketidakpercayaan terhadap keampuhan perjuangan politik rakyat melalui partai-partai Islam.

Kehadiran partai-partai Islam saat ini berbeda dari situasi tahun 1955, di mana ideologi Islam sangat kuat dan partai-partai tersebut berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Namun, pengaruh ideologi Islam tersebut tidak lagi terlihat selama era reformasi dan setelah jatuhnya Soeharto. Walaupun partai partai ini berbasis Islam, Pancasila tidak lagi mereka perdebatkan; mereka mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tetapi mempertahankan Islam sebagai asas partai mereka. Dalam arti lain, partai partai saat ini kurang memiliki ideologi yang jelas. Contohnya adalah partai-partai ideologis seperti PNI dan Masyumi.

Selama era Soeharto, partai-partai baru ini hampir tidak memiliki kekuasaan sama sekali, tetapi kini mereka semakin berambisi untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, partai Islam menggunakan istilah "Islam" semata-mata untuk menarik perhatian publik. Islam dijadikan sebagai titik kumpul untuk menggalang dukungan masyarakat. Tentu saja, partai partai ini juga punya agenda terselubung, seperti memperjuangkan aspirasi umat Islam. Namun, tujuan utama partai-partai Islam saat ini adalah untuk meraih kekuasaan.

Apologi Negara Islam dalam Pancasila

Untuk konteks Keindonesiaan, Nurcholish mengibaratkan Pancasila sebagai Piagam Madinah, karena keduanya berfungsi sebagai platform bersama untuk beragam kelompok masyarakat dan agama. Meskipun Pancasila sebagai dasar etika bangsa baru secara resmi ditetapkan dalam konstitusi, penggabungan dari berbagai sumber, termasuk Islam, yang memperkuat proses pengisian etika politik. Mengenai hubungan antara agama dan negara dalam Islam, Nabi Muhammad memberikan contoh pasca hijrah ke Madinah; "Negara Madinah" ini berperan sebagai model untuk hubungan tersebut, menurut Nurcholish. Ia menyebut model ini sebagai "Eksperimen Madinah" yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat sipil. Masyarakat madani ini ditandai oleh karakteristik seperti "egalitarianisme", keterbukaan terhadap partisipasi setiap anggota masyarakat, dan pemilihan kepemimpinan melalui mekanisme pemilihan, bukan nepotisme. (Majid & Munawar Rachman, 1999).

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa teks Piagam Madinah, yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam, perlu dikaji kembali dari sudut pandang etika politik modern. Dari perspektif kenegaraan kontemporer, piagam ini mengandung ide-ide yang masih sangat relevan, karena di sinilah pertama kali dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi prinsip-prinsip politik modern. Termasuk didalamnya adalah kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan mereka sesuai keyakinan masing-masing, kemerdekaan dalam hubungan ekonomi antar golongan, serta hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan sesuai dengan keyakinan mereka. (Majid & Munawar Rachman, 1999).

Nurcholish Madjid sejak awal telah menyatakan bahwa Indonesia, dalam pandangannya, memiliki landasan yang kuat dan kokoh untuk pengembangan toleransi beragama dan pluralisme, yaitu Pancasila (Madjid, Cita Cita Politik Islam). Ini dapat dipahami sebagai tawaran untuk merespons gejolak sosial politik di tengah masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang ada. Pancasila merupakan adopsi yang paling netral terhadap keanekaragaman yang terdapat di Indonesia. Menurut Caknur, Indonesia bukan negara teokratis, juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berlandaskan Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila telah sangat mengakomodasi kemajemukan di negara ini, yang tercermin dalam pasal 1 yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban tertentu untuk menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” (Madjid, Tradisi Islam).

Rekonstruksi pemahaman terhadap Pancasila menunjukkan bahwa Caknur berupaya menggali nilai-nilai dalam Islam terutama inklusivitas. Upaya ini, dalam konteks yang lebih luas, berkemungkinkan untuk umat Islam agar mampu menerima dengan sepenuh hati konsep inklusivitas yang diusung oleh negara Pancasila. Nurcholish mengajarkan pentingnya menerima

kemajemukan, dan dalam keragaman tersebut, oleh nilai nilai keyakinan etis yang sama yang tercermin dalam etika pada setiap sila Pancasila kita disatukan.

> *"Umat Islam Indonesia baiknya tidak perlu lagi mempersoalkan Pancasila. Karena keselarasan Pancasila dan ajaran Islam itu sendiri yang menjadikannya sebagai dinamika Sejarah yang menarik. Dan karena penerimaan terhadap Pancasila itulah yang menjadikan Masyarakat Indonesia mampu merawat keanekaragaman dan kemajemukan yang ada."* (Madjid, Tradisi Islam…)

Era Reformasi (1998)

Nurcholish, sebagai salah seorang intelektual terkemuka yang ada di Indonesia, memainkan peran yang sangat signifikan selama era Reformasi, khususnya antara tahun 1998 hingga 2005. Jatuhnya rezim Orba pada tahun 1998 membuka fase baru dalam sejarah Indonesia, yang ditandai oleh kebebasan berpendapat dan meningkatnya partisipasi politik. Dalam konteks ini, Nurcholish segera mengambil inisiatif untuk mengadvokasi nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

1998: Awal Era Reformasi

Setelah jatuhnya Orde Baru, Nurcholish Madjid menjadi salah satu suara terdepan yang menyerukan perlunya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ia menganggap bahwa Islam harus berperan aktif dalam mendukung nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Dalam berbagai forum publik, Nurcholish menegaskan pentingnya pemisahan antara agama dan negara, untuk mencegah dominasi satu kelompok terhadap yang lain, dan mendorong penegakan hukum yang adil (Shihab, 2002). Pemikirannya ini mencerminkan pandangannya bahwa Islam sebagai agama harus menjadi sumber inspirasi, bukan alat untuk kekuasaan.

Nurcholish juga berperan dalam mendidik masyarakat untuk memahami arti penting dari kebebasan dan demokrasi. Ia menggunakan media, baik melalui tulisan maupun ceramah, untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks demokrasi. Hal ini penting untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era baru di mana partisipasi aktif dalam politik menjadi lebih mungkin dan diperlukan.

1999: Pemilu Pertama Pasca-Reformasi

Memasuki tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilu legislatif pertama setelah reformasi. Dalam konteks ini, Nurcholish berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemilu yang jujur dan adil adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Melalui berbagai seminar dan diskusi, ia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, memberikan suara mereka dalam pemilu, dan memilih calon yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Mun'im, 2004).

Lebih dari sekadar menyerukan partisipasi, Nurcholish juga menekankan perlunya pendidikan politik yang mendalam. Ia percaya bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak dalam memilih pemimpin. Dalam hal ini, ia mengadvokasi agar lembaga-lembaga pendidikan menyediakan kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman tentang sistem demokrasi.

2000: Dialog Antaragama dan Kerukunan Sosial

Tahun 2000 menjadi tahun yang penting bagi Nurcholish dalam memperjuangkan dialog antaragama. Di tengah ketegangan antaragama yang meningkat di beberapa daerah, ia mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pertemuan antar tokoh agama. Nurcholish menekankan bahwa perbedaan harus dilihat sebagai kekayaan, bukan ancaman. Ia percaya bahwa dialog adalah cara terbaik untuk mencapai pemahaman dan kerja sama antarumat beragama, yang sangat diperlukan

dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia (Prayitno, 2015). Dalam forum-forum tersebut, ia mengajak umat Islam untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan sebagai bagian dari anugerah Tuhan.

Dalam upayanya untuk menciptakan kerukunan sosial, Nurcholish sering kali mengadakan diskusi lintas agama yang melibatkan pemuka-pemuka dari berbagai agama. Ia berharap bahwa melalui dialog tersebut, masyarakat dapat memahami nilai-nilai dasar yang mengikat semua agama, yaitu cinta kasih, keadilan, dan toleransi. Pendekatan ini tidak hanya meredakan ketegangan tetapi juga membangun fondasi untuk perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

2001: Pendirian Lembaga Pendidikan

Pada tahun 2001, Nurcholish mendirikan beberapa lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memodernisasi pemikiran Islam. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan kritis. Melalui lembaga-lembaga ini, Nurcholish berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam mempelajari agama. Dengan cara ini, ia berharap dapat melahirkan generasi baru yang mampu berpikir kritis dan terbuka terhadap perubahan (Wahiduddin, 2009).

Di lembaga-lembaga yang didirikannya, Nurcholish memperkenalkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia mendorong pengajaran ilmu-ilmu sosial dan sains sebagai bagian dari pembelajaran, untuk membentuk siswa yang tidak hanya paham agama tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.

2002: Kebangkitan Islam yang Moderat

Di tengah tantangan global yang dihadapi umat Islam, Nurcholish mengeluarkan pemikiran tentang kebangkitan Islam yang moderat. Ia menekankan bahwa Islam harus mampu beradaptasi dengan konteks modern tanpa kehilangan esensinya. Nurcholish mengkritik ekstremisme yang sering kali merusak citra Islam di mata dunia, dan mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran utama Islam yang mengedepankan kasih sayang dan keadilan (Sirry, 2010). Pemikirannya ini mendapat perhatian luas di kalangan akademisi dan masyarakat umum, yang mencari jalan tengah dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Dalam ceramah dan tulisannya, Nurcholish menjelaskan bahwa moderasi adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan stabilitas. Ia mengajak umat Islam untuk memahami bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan modernisasi, melainkan sebaliknya, dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan moderat yang ia anjurkan ini diharapkan dapat mengatasi perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam dan memperkuat solidaritas di antara mereka.

2004: Pemilu Presiden dan Partisipasi Politik

Tahun 2004 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia, karena diadakan pemilu presiden. Nurcholish menggunakan kesempatan ini untuk mendorong masyarakat agar memilih calon pemimpin yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dalam berbagai seminar dan tulisan, ia menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan dalam masyarakat yang multikultural, serta mampu membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik (Shihab, 2002).

Ia juga mengajak pemilih untuk mempertimbangkan visi dan misi calon pemimpin secara kritis, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kepentingan sesaat. Nurcholish berargumen bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki integritas dan mampu mengimplementasikan program-program yang berpihak kepada rakyat. Pendekatan ini

mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

2005: Karya Tulis dan Pengaruh di Kalangan Generasi Muda

Memasuki tahun 2005, Nurcholish tetap aktif dalam dunia penulisan dan publikasi. Ia menerbitkan berbagai artikel dan buku yang membahas isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peran agama dalam konteks modern. Karya-karyanya tidak hanya menjadi rujukan akademis, tetapi juga menginspirasi banyak kalangan, terutama generasi muda yang ingin memahami tantangan zaman dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat (Mun'im, 2004). Melalui tulisan-tulisannya, Nurcholish berhasil mengajak generasi muda untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam perubahan sosial.

Ia juga aktif dalam forum-forum diskusi, seminar, dan konferensi, berbagi pemikirannya dengan para pemuda dan mahasiswa. Dalam berbagai kesempatan tersebut, Nurcholish menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa. Ia percaya bahwa melalui pemikiran yang progresif dan tindakan yang berani, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

Peran Nurcholish Madjid selama era Reformasi (1998-2005) sangat signifikan dalam membentuk pemikiran Islam yang moderat dan mendukung nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kontribusinya dalam pendidikan, dialog antaragama, dan advokasi hak asasi manusia menjadi warisan penting bagi masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya memperkuat posisinya sebagai intelektual dan pemimpin pemikiran, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Pemikirannya yang moderat dan inklusif akan terus menjadi rujukan bagi generasi mendatang dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

C. Luaran (*output)* Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Pembaharuan dan Modernisasi Politik Islam di Indonesia (1965-2005)

1. Paramadina Sebagai Laboratorium Intelektual Islam

Warisan Caknur

Meskipun Caknur meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005, pengaruhnya tetap bertahan hingga saat ini. Ia berhasil memfasilitasi komunikasi antara masyarakat yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Dia mampu mendamaikan kesulitan kontemporer dengan masalah-masalah Keislaman Keindonesiaan dan Kemodernan. Iman dan hubungannya dengan amal. (Kuzman 2003). Selain itu, ia juga berhasil menempatkan Islam pada posisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui dukungan teologisnya, Cak Nur menunjukkan gagasan sekularisasi yang mengejutkan komunitas Islam di Indonesia, sehingga dapat diketahui bahwa sekularisasi tidak sama dengan sekularisme.

Ia tidak hanya mewarisi konsep dan gagasan, tetapi juga sejumlah lembaga pendidikan yang telah ia dirikan. Intansi-instansi ini masih menjalankan dan melanjutkan visi Caknur. Meskipun beliau sudah tidak bersama kita lagi, namun keyakinannya tetap bertahan.

Yayasan Wakaf Paramadina

Asda M. Wahyuni Nafis menyatakan bahwa Dawam Raharjo adalah inspirasi di balik berdirinya Yayasan Wakaf Paramadina. Dawam dikabarkan mendapat "wahyu" tentang forum kajian seperti Reboan namun yang lebih besar. Dawam menghubungi para dermawan seperti Ahmad Ganis, Abdillah Thoha, dan Aniswati. Quraisy Shihab, Aqib Suminto, dan Caknur adalah tiga tokoh yang membentuk Paramadina awal. Pada akhirnya, Caknur ditunjuk sebagai pemimpin

Paramadina. Dawam ditunjuk sebagai direkturnya.

Caknur dan rekan-rekannya secara resmi mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina (selanjutnya disebut Paramadina) pada tanggal 31 Oktober 1986, yang ditandai dengan sebuah ceramah di Hotel San Pasific yang berjudul "Keislaman dan Keindonesiaan: Menatap Masa Depan". Caknur terpilih pada saat itu untuk menjabat sebagai ketua umum Paramadina. Sebagai sebuah organisasi, Paramadina berkomitmen untuk mendorong perubahan sosial di Indonesia *(Social Change)*, terutama di kalangan mahasiswa dengan pendidikan perkotaan. (Nafis 2014)

Nama Paramadina mencerminkan prinsip-prinsipnya. Ada tiga penafsiran untuk nama Paramadina: *pertama,* kata *"para"* dalam bahasa Spanyol berarti "untuk", sedangkan kata *"madina"* dalam bahasa Arab berarti "kota" atau "peradaban". Sebuah kota dicirikan sebagai pusat peradaban, yang sering dikenal sebagai pemerintahan. Kata Arab untuk "peradaban" atau "pemerintahan" adalah *"madaniyah"* yang juga berarti *"polis"* dalam bahasa Yunani dan *"civilis"* dalam bahasa Latin. Dengan demikian, membangun masyarakat madani yang terbuka dan demokratis dalam kerangka agama, budaya, politik, pluralisme, toleransi, dan pemahaman lintas agama merupakan program yayasan Paramadina.

Kedua, Kata *"para"* dalam bahasa Latin berarti "setara, sepemikiran". Ini adalah keyakinan mendasar dan tujuan utama dari usaha Paramadina, yaitu membangun peradaban melalui ketundukan kepada Tuhan (Islam). *Ketiga 'Parama',* yang berarti unggul dan utama dalam bahasa Sansekerta, . *'dina'* atau *'din'* (bahasa Arab) berarti agama. Oleh karena itu, Paramadina juga dipahami sebagai agama Islam, agama yang paling utama.

Karena sistem wakaf menjamin integritas dan perlindungan terhadap kepentingan bersama, maka yayasan wakaf dipilih sebagai sistem Paramadina. Wakaf dipandang sebagai aset bersama yang telah disucikan oleh iman. Wakaf mungkin dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menyimpang dari tujuannya. Misalnya, otoritas oleh satu orang atau lebih. (Siraj F. M., 2020)

Kampus Peradaban

Kampus Peradaban adalah julukan yang diberikan kepada Universitas Paramadina. Kata ini bersumber dari kajian dasar-dasar filosofis pendiri seperti yang disampaikan dalam pidatonya (Caknur). Dua ayat Al-Qur'an dan satu hadits menjadi landasan teologis pendirian Universitas Paramadina.

Allah menurunkan kitab dan hikmah kepada kamu dan mengajarkan kamu sesuatu yang berlum pernah kamu ketahui (QS An Nisa 4:113).

Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang dianugerahi hikmah maka dia benar benar dianugerahi kebaikan yang melimpah (QS Al Baqarah 2:269)

Hikmah ialah kebenaran diluar kenabian (HR. Bukhari)

Menurut Caknur, risalah kenabian adalah fondasi dan sumber peradaban. Hal ini mencakup 1) penyebaran ajaran-ajaran ilahi (Kitab Suci); 2) pertumbuhan hikmah-kearifan (kebenaran di luar kenabian); dan 3) studi sejarah dan fenomena alam sebagai bukti kebesaran Tuhan untuk mengetahui lebih banyak dari yang dipahami manusia saat ini. (Siraj F. M., 2020)

Selain itu, sebuah risalah kenabian, dibawa oleh individu-individu yang memiliki pemahaman keilmuan yang disebut sebagai Ulama. Oleh karena itu, ulama mendorong pendidikan dan penelitian yang mensintesiskan (merangkum) *(jami'ah)* seluruh ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan menyeluruh *(kulliyah)* terhadap bidang-bidang lain dari ilmu

pengetahuan, yang melibatkan wacana kritis *(munazharah),* pengamatan yang ketat *(mulazharah)*, dan perbandingan *(muqaranah)*. dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dilengkapi dengan eksperimen *(tajribah)* dalam laboratorium *(ma'mal).* Dan ketika sudut pandang teoritis (*nazhar,* akal) berhasil dibuktikan, maka menghasilkan kesimpulan ilmiah yang solid - pengetahuan *mujarrab* (tercapai, yang divalidasi oleh eksperimen). (Siraj, 2020)

Caknur mengklaim bahwa ciri khas Universitas Paramadina terletak pada wawasan asasinya. Pidato pendirian Universitas Paramadina menjelaskan wawasan asasi tersebut : institusi ini menawarkan pendidikan umum dan liberal untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan pesat di masa depan, yang mungkin berbeda dengan masa kini. Pemahaman tentang keindonesiaan dan kemanusiaan berbasis iman menginspirasi kemampuan ini. Oleh karena itu, penciptaan program studi sangat menekankan pada kedalaman intelektual, kebebasan berpikir, dan cakupan pengetahuan. Sekali lagi, tujuan dari semua inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas peserta studi agar dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat di dunia yang berubah dengan cepat. (Siraj, 2020)

Selain mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir, Universitas Paramadina juga membantu mereka mengembangkan potensi diri untuk menjalani kehidupan yang bermakna di mana pun mereka berada. Potensi ini termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah *(problem solving)*, berpikir kritis saat membuat keputusan, dan memiliki pikiran yang terbuka.

Peserta studi dengan disiplin ilmu dan latar belakang pendidikan tertentu tidak dibatasi penerimaannya oleh Universitas Paramadina. Fokusnya adalah menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang kuat.

Mahasiswa dan staf pengajar di Universitas Paramadina dipandang sebagai kolega atau rekan sejawat dalam memajukan pengetahuan dan tradisi intelektual. Selain itu, staf pengajar bertanggung jawab atas separuh dari tugas-tugas akademis dalam proses belajar mengajar. Mahasiswa harus menggunakan inisiatif mereka sendiri untuk menyelesaikan setengah sisanya melalui penelitian, kegiatan ilmiah, dan pengembangan ide-ide mereka secara aktif dan kreatif. (Siraj, 2020)

Evaluasi Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid

Setelah melewati uraian dan penjelasan yang panjang berkenaan dengan pemikiran Nurcholish Madjid terkait Pembaharuan dan Modernisasi Politik Islam di Indonesia. Yang selalu menjadi pembahasan pada diskursus pemikiran Caknur, adalah Relevansi pemikirannya pada dunia terkhusus Indonesia yang dewasa ini. Mengingat kepulangan Caknur dari 2005 silam. Berikut adalah poin poin kerelevansian pemikiran Nurcholish Madjid ;

Pertama dan terpenting, agama Islam memiliki hubungan dengan politik karena mencakup semua aspek kehidupan manusia. Caknur mengatakan bahwa salah satu ciri kejayaan Islam pada awalnya adalah politik. Berdirinya suatu Negara ditentukan oleh pemikiran politik yang dianutnya, karena politik dalam arti *lughawi* berarti memelihara urusan umat.

Kedua, Caknur mengatakan bahwa demokrasi adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia dan bahwa seiring berjalannya waktu, Indonesia harus mengembangkan demokrasi yang lebih maju sebagai konsekuensi logis dari kemajuan pembangunan negara. Tingkat ekonomi yang baik, keamanan dan ketertiban yang stabil, dan persatuan dan kesatuan nasional adalah beberapa keuntungan yang dimiliki Indonesia.

Ketiga, gagasan Nurcholish Madjid "Islam YES, partai Islam NO" menimbulkan kesadaran baru bagi ummat Islam pada tahun 1970-an. Akibatnya, wajah politik Islam di Indonesia berubah dari formalistik-legalistik ke substansialistik, dengan fokus pada mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur daripada idealisme tentang berdirinya Negara Islam. Islam sekarang dilihat dari perspektif nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan nasional daripada struktur simbolik.

Proses artikulasi politik Islam di Indonesia sangat penting karena diharapkan dapat menghasilkan sintesa yang mungkin antara Islam dan negara. Oleh karena itu, studi tentang pemikiran politik Islam yang khas di Indonesia tidak hanya menarik tetapi juga mendesak. Dan kemudian lebih berfokus pada cara melaksanakannya untuk mengubah Indonesia yang lebih maju.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pembaharuan dan modernisasi politik Islam di Indonesia yang diusung oleh Nurcholish Madjid menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan serta politik di era Reformasi. Melalui pemikirannya yang moderat, Nurcholish berhasil menjembatani antara nilai-nilai Islam dan tuntutan demokrasi, menciptakan kerangka pemikiran yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Pertama, Nurcholish menekankan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam kehidupan beragama. Ia percaya bahwa keragaman adalah kekayaan yang harus dirayakan, bukan dipertentangkan. Pendekatannya dalam mengadvokasi dialog antaragama membantu meredakan ketegangan sosial dan memperkuat kerukunan di masyarakat yang majemuk.

Kedua, Nurcholish menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai pembaharuan. Ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern, berupaya menciptakan generasi yang berpikir kritis dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Melalui pengajaran yang inovatif, Nurcholish berusaha mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.

Ketiga, dalam konteks politik, Nurcholish secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ia mengajak umat Islam untuk terlibat dalam politik secara aktif dan bertanggung jawab, serta memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pemikirannya tentang pemisahan antara agama dan negara menjadi panduan bagi banyak kalangan untuk memahami peran agama dalam konteks politik modern.

Akhirnya, kontribusi Nurcholish Madjid dalam pembaharuan politik Islam di Indonesia adalah warisan yang terus relevan. Pemikirannya memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pluralisme, serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan beradab. Dengan demikian, Nurcholish Madjid tidak hanya menjadi tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam, tetapi juga menjadi pelopor bagi gerakan pembaharuan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pembaharuan dan modernisasi politik Islam di Indonesia melalui perspektif Nurcholish Madjid, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan**: Penting bagi lembaga pendidikan di Indonesia untuk mengintegrasikan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya memahami, tetapi juga siap berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. **Promosi Dialog Antaragama**: Dalam konteks keragaman masyarakat Indonesia, upaya

untuk mempromosikan dialog antaragama harus terus dilakukan. Pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk menyelenggarakan forum-forum dialog yang mempertemukan berbagai pemuka agama dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu memperkuat toleransi dan mengurangi potensi konflik.

3. **Pemberdayaan Masyarakat**: Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Ini termasuk memberikan pelatihan dan edukasi mengenai hak-hak politik, proses pemilihan umum, dan cara mengawasi akuntabilitas pemimpin. Keterlibatan masyarakat dalam politik akan memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif.
4. **Pengembangan Pemikiran Moderat**: Dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan intoleransi, penting untuk terus mengembangkan pemikiran moderat yang sejalan dengan ajaran Islam. Lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan harus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati.
5. **Penelitian Lanjutan**: Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pemikiran Nurcholish Madjid dalam konteks kekinian. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang relevansi pemikirannya dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia saat ini.

Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembaharuan dan modernisasi politik Islam di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan : Makna Respons Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993).* Yogyakarta: Tiara Wacana.

AF, A. G. (2010). *Api Islam Nurcholish Madjid : Jalan Hidup Seorang Visioner.* Jakarta: Kompas.

Ahmad A Royhan, S. M. (2003). *Gagasan Caknur Tentang Negara dan Islam.* Titian Ilahi Press.

Aminudin. (1999). *Kekuatan Islam dan Pergulatan kekuasaan di Indonesia : Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto.* Pustaka Pelajar.

Amroini Drajar, S. (2010). *Kritik Falsafah Peripatetik.* Yogyakarta: LKiS.

Anshari, E. S. (1982). *Wawasan Islam : Pokok Pokok Pikiran Islam dan Ummatnya.* Jakarta: Rajawali Press.

Azra, A. (2000). *Islam Subtantif : Agar Umat Tidak Jadi Buih.* Mizan.

Azra, A. (2006). *Islam Dan Demokrasi : Sebuah Dialog.*

Barton, G. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahamn Wahid, 1968-1980.* Jakarta: Paramadina.

Efendy, B. (2000). *Repolitisasi Islam : Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Mizan.

Effendi, D. (2008). *Dari Pembaruan ke Reformasi: Jejak Pemikiran Nurcholish Madjid.* Jakarta: Paramadina.

Fachry Ali, B. E. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam.* Bandung: Mizan.

Fadillah, R. (2019). Polemik Pemikiran Nurcholish Madjid dan Islam Formalistik. *Jurnal Pemikiran Islam*, 22-39.

Faiz, F. (2018). *The Role of Ijtihad in Nurcholish Madjid's Thought.*

Fauzi. (2022). *Politik Islam Perspektif Nurcholish Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam di Indonesia.* Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press.
Gaarder, J. (1991). *Sofie's Verden.* Norwegia: Mizan.
Gootschalk. (1983). *Mengerti Sejarah.* Jakarta: Universitas Indonesia.
Harahap, S. (2015). *Islam dan Modrenitas.* Jakarta: Pranamedia.
Hassan, M. K. (1987). *Modernisasi Indonesia : Respon Cendikiawan Muslim.* Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
Iqbal, M. &. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia.* Kencana.
Ismail, F. (2010). *Sekularisasi : Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid.* . Jakarta: Lasswell Visitama.
Jannah, N. (2017). Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara kontribusi dan kontroversi). *CAKRAWALA : Jurnal Studi Islam*.
Kamal Hasan, M. (1987). *Modernisasi Indonesia* . Bina Ilmu.
Kartodirjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiograf Indonesia ; suatu Alternatif.* Jakarta: Gramedia.
Khaeroni, C. (2020). Nurcholish Madjid (1939-2005). *At Tajdid*, 178-190.
Kumalasari, D. (n.d.). Metode Penelitian Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah FIS UNYY*.
Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Bentang.
Kuzman, C. (2003). *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu Isu Global.* Jakarta: Paramadina.
Madjid, N. (1992). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.* Bandung: Mizan.
Madjid, N. (1994). *Islam Dan Pemikiran Kritis.* Jakarta: Paramadina.
Madjid, N. (1998). *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat* . Bandung: Mizan.
Madjid, N. (2003). *Islam Agama Kemanusiaan.* Jakarta: Paramadina.
Madjid, N. (2019). *Islam : Doktrin dan Peradaban.* Gramedia Pustaka Utama.
Nadroh, S. (1999). *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholish Madjid.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
Nafis, M. W. (2014). *Cak Nur Sang Guru Bangsa : Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid.* Jakarta: Kompas.
Nasution, H. (1992). *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang.
Nihaya. (2002). Sejarah Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia. *Pusat Penelitian IAIN Alauddin*, 6.
Nurcholish, M. (1992). *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan : Pikiran Pikiran Nurcholish Madjid Muda.* Bandung: Mizan.
Nurcholish, M. (2010). Pengaruh Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Kebangkitan Islam di Indonesia.". *Jurnal Studi Islam*, 50-65.
Pardoyo. (1993). *Sekularisasi Dalam Polemik.* Jakarta: Pustaka Utama Graviti.
Rachman, B. M. (2008). *Membaca Nurhcolish Madjid : Islam dan Pluralisme.* Jakarta: Studi Agama dan Filsafat.
Raharjo, D. (1987). *Pergulatan Dunia Pesantren.* Jakarta: P3M.
Rahman, F. (1987). *ISLAM.* Bina Aksara.
Rakhmat, J. (2003). *Prof. Dr. Nurcholish Madjid : Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam* . Jakarta: Radar Jaya Offset.

Rasjidi, H. (1972). *Sekularisasi, Koreksi terhadap Dr. Nurcholish Madjid tentang.* Jakarta: Bulan Bintang.

Ridwan, N. K. (2001). *Islam Borjuis dan Islam Proletar.* Yogyakarta: Galang Press.

Ridwan, N. K. (2002). *Pluralisme Borjuis : Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur.* Yogyakarta: Galang Press.

Rusli, R. (2014). *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo.

Santoso, N. M. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.* Mizan.

Sartono, K. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sayuti. (2016). Perspektif Teori Modernisasi Pada Daerah Otonom Terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 95-111.

Siraj, F. M. (2020). *Nilai Hidup Paramadina.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi : Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Peneltian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tarigan, A. A. (2007). *Islam Mazhab HMI : Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan.* Medan: Kultura.

Urbaningrum, A. (2004). *Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholish Madjid.* Jakarta: Republika.

Voll, J. O. (1987). *Pembaruan dan Perubahan dalam Sejarah Islam : Tajdid dan Ishlah* . Jakarta: Rajawali Press.

Wahib, A. (1993). *Pergolakan Pemikiran Islam.* Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.

William, L. R. (1997). *Islam Politik dan Modernisasi.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.